

PENJELASAN/ KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG  
TENTANG  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat tersusun Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati Semarang ini kami susun, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Semarang, TAPD dan seluruh perangkat Daerah serta berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan hingga penetapan Peraturan Daerah ini.

Ungaran, November 2025

Hormat Kami,

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN .....	1
D. DASAR HUKUM .....	2
BAB II POKOK PIKIRAN .....	3
BAB III MATERI MUATAN .....	4
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN .....	4
B. RUANG LINGKUP MATERI .....	4
BAB IV PENUTUP .....	5
A. KESIMPULAN .....	5
B. SARAN .....	5
DAFTAR PUSTAKA.....	6

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor ... Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

#### **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Penyusunan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan dikarenakan adanya beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Semarang dalam Pelaksanaan Anggaran khususnya terkait dengan Pendapatan di tahun anggaran 2026;
2. Sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Semarang dalam Pelaksanaan Anggaran khususnya terkait dengan Belanja di tahun anggaran 2026;
3. Sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Semarang dalam Pelaksanaan Anggaran khususnya terkait dengan Pembiayaan di tahun anggaran 2026;

#### **C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN**

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dalam APBD Tahun Anggaran 2026;
2. Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk menampung kebijakan-kebijakan dan prioritas daerah untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
3. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

#### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor ...);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Rancangan Peraturan Bupati ini memuat pokok-pokok pikiran antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa raperbup APBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Bahwa raperbup APBD ini disusun dengan berpedoman pada Perda APBD Tahun Anggaran 2026;
3. Bahwa rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Penjabaran APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
5. Bahwa Penjabaran APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
6. Bahwa Penjabaran APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan pada muatan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Dengan adanya rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan prioritas-prioritas daerah dan kebijakan-kebijakan daerah dapat dilaksanakan untuk mencapai target dan prioritas daerah.

#### **B. RUANG LINGKUP MATERI**

**Ruang lingkup dalam penyusunan Raperbup ini meliputi:**

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026;
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026;
5. Lampiran Iva Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;
6. Lampiran Ivb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
9. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026;
10. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2026;
11. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 perlu ditetapkan dengan tujuan:

1. Mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal;
2. Menetapkan prioritas belanja daerah;
3. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah terkait pendapatan dan belanja daerah;
4. Sebagai bentuk tranparansi antara pemerintah daerah, DPRD dan Masyarakat.
5. Sebagai pedoman SKPD dalam melaksanakan kegiatannya.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan agar segera menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026 agar Pemerintah Daerah dapat segera mengatur penerimaan dan belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 dan mencapai tujuan fiskalnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727).